

**KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN LABORATORIUM
NASIONAL SRI OEMIJATI PASKA PERALIHAN BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN**

Disusun Oleh:

NAMA : FAUZUL MUNA
NPM : 2241021034
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

**Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

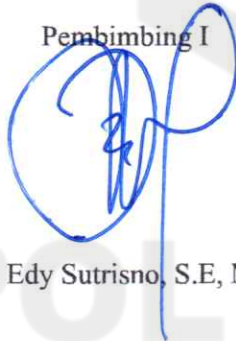
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Fauzul Muna
NPM : 2241021034
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Kebijakan Penataan Kelembagaan Laboratorium Nasional
Sri Oemijati Paska Peralihan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
*Tesis Title : The Institutional Arrangement Policy of Sri Oemijati
National Laboratory Post Transition of The National
Institute of Health Research and Development*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis.

Pembimbing I



(Dr. Edy Sutrisno, S.E, M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Bambang Giyanto, S.H, M.Pd)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : FAUZUL MUNA
NPM : 2241021034
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN
LABORATORIUM NASIONAL SRI OEMIJATI
PASKA PERALIHAN BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

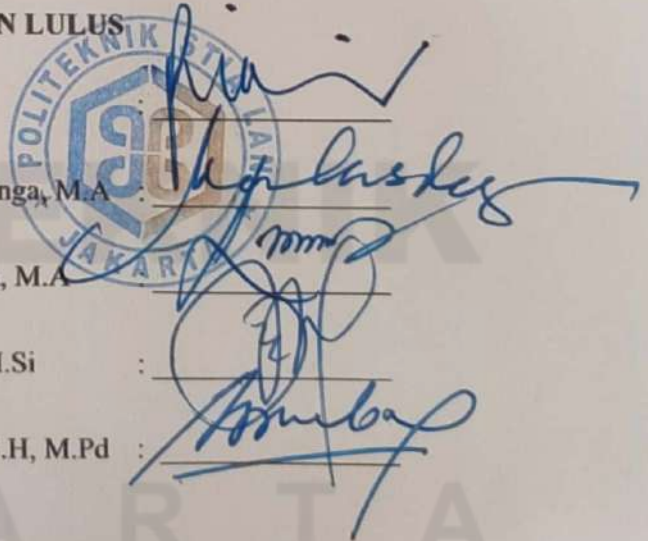
Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024
Pukul : 08.30 – 10.00

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Sekretaris : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A.
Anggota : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A.
Pembimbing 1 : Dr. Edy Sutrisno, S.E, M.Si
Pembimbing 2 : Dr. Bambang Giyanto, S.H, M.Pd



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzul Muna

NPM : 2241021034

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang sudah saya susun merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari hasil penelitian tesis ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 30 Mei 2024



Fauzul Muna

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Waa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Kebijakan Penataan Kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati Paska Peralihan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan”.

Ketertarikan saya terhadap penataan kelembagaan ini karena merupakan fenomena yang sudah saya alami sendiri sejak tahun 2021-2023, dimana lembaga tempat saya bekerja harus mengalami perubahan. Dalam setiap perubahan saya menyadari bahwa ada hal yang harus dikorbankan dan ada hal yang harus dirubah demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, saya berharap tesis ini dapat memberikan masukan dan bahan pembelajaran dalam proses kelembagaan.

Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E, M.Si dan Bapak Dr. Bambang Giyanto, S.H, M.Pd selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, atas kebaikan dan kesabaran beliau berdua miliki dalam membimbing dan mengarahkan serta memahami keterbatasan pengetahuan yang saya miliki dalam penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A dan Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A selaku dosen pembahas dan penguji dalam penyusunan tesis ini, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dalam memperkaya penulisan tesis ini.

Penyusunan tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Keluarga besar Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Para narasumber penelitian saya yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, dengan data dan informasi lengkap dari Bapak/Ibu maka penyusunan tesis ini menjadi lebih kaya informasi.
4. Suami saya Fatah Umar dan kedua anak saya Fatih Izulhaq dan Faiza Hasna yang selama ini telah bersabar dan memberikan dukungan, doa, serta waktunya agar saya dapat segera menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Masykuri dan Ibu Sunarti yang tidak lelah dalam mendoakan, mendukung, dan menasehati saya sampai saat ini.
6. Seluruh pegawai Bagian Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan yang sudah membantu kelancaran studi saya selama di Politeknik STIA LAN Jakarta.
7. Seluruh teman Magister Terapan angkatan tahun 2022 yang sudah saling mendukung dan berjuang bersama-sama.

Tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu tetapi terkait selama penyusunan tesis ini. Terlepas dari itu semua, saya menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam tesis ini, maka dengan terbuka saya menerima saran dan kritik demi perbaikan ke depan.

Akhir kata saya berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi unit eselon satu Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dimana saya mengabdikan dan secara umum dapat bermanfaat menjadi bahan pembelajaran serta referensi bagi peneliti lainnya.

Jakarta, 30 Mei 2024
Peneliti

Fauzul Muna



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Studi Kasus Kebijakan Penataan Kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati Paska Peralihan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Fauzul Muna

fauzul.2241021034@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Paska peralihan Badan Litbangkes ke BRIN, Laboratorium Nasional Sri Oemijati mengalami proses penataan kelembagaan, sehingga perlu diteliti mengapa kebijakan penataan kelembagaan ini belum berjalan optimal dan bagaimana strategi penataan kelembagaannya. Penataan kelembagaan merupakan proses siklus yang mengiringi tumbuh dan berkembangnya sebuah lembaga, sehingga dapat terjadi penggabungan dua/lebih instansi ataupun perubahan bentuk instansi. Metode kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara secara mendalam dilakukan dalam penelitian ini. Triangulasi data dilakukan untuk menghasilkan data berkualitas. Temuan dalam penelitian ini bahwa faktor eksternal berperan di dalam implementasi kebijakan penataan kelembagaan, yaitu: a) politis meliputi regulasi dan kepemimpinan; b) lingkungan dengan pandemi COVID-19; c) sosial karena kebutuhan masyarakat pada sistem kesehatan dan permasalahan kesehatan yang meningkat; serta d) teknis seperti fasilitas, kualitas SDM dan kolaborasi. Faktor administratif (teknis) berperan penting di dalam penataan kelembagaan. Faktor eksternal ini kemudian mendorong penataan kelembagaan yang berdampak di internal lembaga, sehingga substansi penataan kelembagaan seperti struktur, SDM, teknologi, dan penataan fisik akan berubah. Perlu strategi efektif menghadapi dampak proses penataan kelembagaan, yaitu: a) meningkatkan kemampuan SDM dengan program pelatihan; b) melengkapi kekurangan SDM dengan rekrutmen; c) mengharmonisasi regulasi yang mendukung kegiatan; d) memaksimalkan pemanfaatan fasilitas untuk administrasi dan pelayanan; dan e) merencanakan pembangunan fasilitas pelengkap penting yang belum dimiliki.

Kata kunci: Laboratorium Nasional; perubahan kelembagaan; organisasi; kesehatan masyarakat; surveilans

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

The Institutional Arrangement Policy of the Sri Oemijati National Laboratory after the Transition to the National Institute of Health Research and Development

Fauzul Muna

fauzul.2241021034@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

After the transition of the National Institute of Health Research and Development to BRIN, the Sri Oemijati National Laboratory underwent an institutional restructuring process, so it is necessary to examine why this institutional restructuring policy has not been running optimally and what the institutional restructuring strategy is. Institutional structuring is a cyclical process that accompanies the growth and development of an institution, so that there can be a merger of two/more agencies or a change in the form of an agency. Qualitative methods using case studies through in-depth interviews were carried out in this research. Data triangulation is carried out to produce quality data. The findings in this research are that external factors play a role in the implementation of institutional structuring policies, namely: a) political including regulations and leadership; b) environment with the COVID-19 pandemic; c) social because of society's need for the health system and increasing health problems; and d) technical matters such as facilities, quality of human resources and collaboration. Administrative (technical) factors play an important role in institutional structuring. These external factors then drive institutional arrangements which have an impact internally on the institution, so that the substance of institutional arrangements such as structure, human resources, technology and physical arrangements will change. An effective strategy is needed to deal with the impact of the institutional restructuring process, namely: a) increasing human resources capabilities with training programs; b) complementing human resource shortages with recruitment; c) harmonize regulations that support activities; d) maximize utilization of facilities for administration and services; and e) planning the construction of important complementary facilities that do not yet exist.

Key words: National Laboratory; institutional change; organization; public health; surveillance

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	29
1. Tinjauan Kebijakan	29
2. Tinjauan Teoritis	34
a. Administrasi Publik.....	34
b. Kebijakan Publik.....	39
c. Kelembagaan.....	43
d. Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Surveilans.....	53
3. Kerangka Berpikir.....	56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	59
A. Metode Penelitian.....	59
B. Teknik Pengumpulan Data.....	61
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	65
D. Instrumen Penelitian.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
1. Sejarah Laboratorium Nasional Sri Oemijati (Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan).....	67
2. Visi dan Misi	71
3. Tugas dan Fungsi	71
4. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan	73
B. Hasil Penelitian dan Analisis	76
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati.....	76
2. Substansi Penataan Kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati.....	108
3. Strategi Kebijakan Penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati.....	118
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	129
A. Simpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kegiatan dan yang dilakukan oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.....	6
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3. 1	Informan Penelitian	63
Tabel 4. 1	Analisis SWOT dalam implementasi kebijakan penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati	119
Tabel 4. 2	Matriks IFAS penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati	121
Tabel 4. 3	Matriks EFAS penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati	122

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Kedudukan Badan Litbangkes sebagai pelaku riset kesehatan di dalam sistem penelitian kesehatan	4
Gambar 1. 2	(a) Posisi Badan Litbangkes berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 dan (b) Laboratorium Nasional Sri Oemijati berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009	8
Gambar 2. 1	Uraian Konsep Administrasi Publik.....	36
Gambar 2. 2	Paradigma Administrasi Negara menurut Dan Nicholas Henry ...	37
Gambar 2. 3	Alur Proses Pembuatan Kebijakan.....	41
Gambar 2. 4	Konsep Organisasi model Analisis PESTLE	48
Gambar 2. 5	Model perubahan institusional	52
Gambar 2. 6	Situasi Kesadaran Kesehatan	54
Gambar 2. 7	Kerangka Berpikir	57
Gambar 3. 1	Alur Metode Penelitian Studi Kasus	60
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Laboratorium Nasional Sri Oemijati berada di bawah koordinasi Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan)	69
Gambar 4. 2	Perjalanan Waktu Laboratorium Nasional Sri Oemijati dari tahun 2021-2024	73
Gambar 4. 3	Struktur Organisasi UPT Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Laboratorium Nasional Sri Oemijati).....	76
Gambar 4. 4	Dokumentasi Surat Tugas Pengelolaan Laboratorium Rujukan ...	81
Gambar 4. 5	Pilar Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia	89

Gambar 4. 6	Dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 yang berisi fungsi dan tugas BB Laboratorium Biologi Kesehatan (Laboratorium Nasional Sri Oemijati)	94
Gambar 4. 7	Peningkatan Kasus Kesehatan di Indonesia (contohnya (a) Tuberkulosis dan (b) Diabetes millitus).....	95
Gambar 4. 8	Susunan SDM di Laboratorium Nasional Sri Oemijati saat Badan Litbangkes (2021), Peralihan ke BRIN (2022), Diampukan di BKPK (2022), dan sebagai UPT BB Laboratorium Biologi Kesehatan (2023)	102
Gambar 4. 9	Peta Jabatan dan Kebutuhan Pegawai di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Laboratorium Nasional Sri Oemijati).....	103
Gambar 4. 10	Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan Laboratorium Lain	106
Gambar 4. 11	Kegiatan kolaborasi yang melibatkan Laboratorium Regional dan CDC-Atlanta	107
Gambar 4. 12	Struktur Organisasi Laboratorium Nasional Sri Oemijati (a) saat di Badan Litbangkes dan (b) sebagai UPT BB Laboratorium Biologi Kesehatan	109
Gambar 4. 13	Konsep Jejaring Sistem Informasi Laboratorium.....	114
Gambar 4. 14	Dashboard Sistem Informasi Laboratorium yang dimiliki Laboratorium Nasional Sri Oemijati.....	115
Gambar 4. 15	Gedung Laboratorium Nasional Sri Oemijati dan contoh kegiatan yang dilakukan. (a) Gedung Laboratorium, (b) Gedung Biorepositori, dan contoh kegiatan di dalam gedung.....	117
Gambar 4. 16	Matriks strategi SWOT penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
- Lampiran 2. Surat Tugas Nomor: UM.1.05/III/3748/2022 tentang Pengelolaan Laboratorium Pusat Rujukan Nasional yang ditujukan kepada Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (tertanggal 10 Februari 2022)
- Lampiran 3. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor: HK.02.02/B.IX.2/2657/2024 Tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Data Sekunder Penelitian

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Populasi penduduk di Indonesia sekitar 275 juta pada tahun 2022 (BPS, 2023). Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki 17 ribu pulau juga memiliki 129 titik masuk (*entry point*) yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional (Kementerian Perhubungan RI, 2023). Dengan populasi yang tinggi dan wilayah kepulauan yang terbentang luas maka Indonesia mempunyai biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang tinggi. Tingginya keanekaragaman hayati serta interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan menjadikan Indonesia mempunyai risiko yang tinggi terhadap penyakit menular yang mempunyai potensi wabah dan menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat. Seperti adanya wabah COVID-19 pada akhir 2020 yang menimbulkan krisis kesehatan global, regional, dan juga berdampak besar terhadap masalah kesehatan di Indonesia (Ashmi Atthahira et al., 2021).

Di dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit menular yang berpotensi wabah, maka perlu dilakukan pengelolaan dan penatalaksanaan yang tepat dan akurat. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa penatalaksanaan yang tepat dan akurat dalam menanggulangi dampak penyebaran penyakit wabah sangat diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi bersama-sama antara instansi pemerintah, masyarakat dan juga dunia internasional (Xian et al., 2022). Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kegiatan surveilans. Kegiatan surveilans merupakan kegiatan pengumpulan, analisis dan interpretasi data kesehatan yang berkelanjutan serta sistematis yang penting digunakan dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam kegiatan kesehatan masyarakat (Center for Disease Control and Prevention, 2002; Centers for Disease Control and Prevention, 2017). Kegiatan surveilans ini melibatkan berbagai lembaga termasuk di dalamnya adalah laboratorium sebagai salah satu bagian kegiatan

surveilans dalam pengumpulan data yang akurat berkaitan dengan diagnosis penyakit terutama penyakit menular (World Health Organization, 2016).

Badan Litbangkes merupakan lembaga yang dirancang sebagai lembaga riset di Kementerian Kesehatan yang berfokus kepada riset di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015. Selain itu, Badan Litbangkes mempunyai fungsi dan peranan penting dalam kegiatan surveilans di Kementerian Kesehatan karena keberadaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati. Fungsi dan peranan penting ini diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658 tahun 2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging Dan Re-Emerging. Walaupun fungsi utama Badan Litbangkes terkait dengan penelitian, pengembangan dan inovasi telah dialihkan ke BRIN, namun keberadaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati ini perlu dipertahankan.

Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian yang mempunyai tugas utama dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Di dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yaitu berkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan secara nasional maka perlu didukung oleh peran dari badan/lembaga di dalam maupun di luar Kementerian Kesehatan. Badan internal Kementerian Kesehatan yang berperan dalam membantu peningkatan mutu kesehatan nasional salah satunya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes). Badan Litbangkes sudah berdiri sejak tahun 1975 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 114 Tahun 1975 sebagai dasar hukum berdirinya Badan Litbangkes yang berperan dalam pembangunan kesehatan nasional di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (Agus Suwandono et al., 2020).

Badan Litbangkes merupakan lembaga yang dirancang sebagai lembaga riset di Kementerian Kesehatan yang berfokus kepada riset di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015. Fungsi yang melekat terhadap Badan Litbangkes yaitu dalam menyusun kebijakan

teknis penelitian dan mengembangkan penelitian di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, serta sumber daya manusia dan humaniora kesehatan. Selain menyusun kebijakan teknis penelitian juga melekat tugas dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan; memantau, mengevaluasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; dan melaksanakan administrasi Badan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, 2015).

Riset kesehatan yang dilakukan oleh Badan Litbangkes ini bertujuan untuk menghadapi tantangan di masa kini, serta menghadapi perubahan di masa depan. Riset kesehatan yang dilakukan oleh Badan Litbangkes bukan hanya riset yang bersifat *top-down* namun juga *bottom-up* dalam menghadapi permasalahan kesehatan di Indonesia. Badan Litbangkes ditugaskan untuk dapat memberikan data dan fakta yang dapat diadopsi menjadi kebijakan atau inovasi perbaikan program kesehatan. Selama ini, 70 % penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbangkes digunakan untuk kebijakan, dan 30% nya untuk inovasi program kesehatan komunitas (Agus Suwandono et al., 2020).

Gambar 1. 1 Kedudukan Badan Litbangkes sebagai pelaku riset kesehatan di dalam sistem penelitian kesehatan



Sumber : Dance of Mind, Badan Litbangkes, 2018

Sebagai lembaga penelitian, Badan Litbangkes mempunyai 4 Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) dan 1 Sekertariat Badan. Keempat pusat tersebut adalah Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Puslitbang Sumber Daya dan Pelaksanaan Kesehatan, Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan. Laboratorium Nasional Sri Oemijati berada di bawah ampunan Puslitbang Biomedis. Laboratorium Nasional Sri Oemijati merupakan laboratorium penelitian yang berperan dalam melakukan penelitian dasar, klinis dan kesehatan, serta menghasilkan data yang nantinya akan digunakan oleh Kementerian Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *new-emerging* dan *re-emerging* menempatkan Laboratorium Nasional Sri Oemijati sebagai Laboratorium Pusat Rujukan Nasional. Selain sebagai Laboratorium Pusat Rujukan juga mempunyai fungsi dan peran lain yaitu sebagai pusat kerjasama laboratorium penyakit infeksi *new-emerging* dan *re-emerging* dengan dunia internasional (Pasal 4 ayat (3)). Penyakit infeksi *new-emerging* dan *re-emerging*

merupakan penyakit infeksi yang memerlukan penelaahan risiko karena dapat menimbulkan risiko kedaruratan kesehatan masyarakat secara global, berpotensi menular secara cepat lintas wilayah maupun negara, mampu memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat sehingga memerlukan penanganan nasional yang terkoordinasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging Dan Re-Emerging, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 maka Laboratorium Nasional Sri Oemijati menjadi laboratorium yang menjalankan peran sebagai laboratorium diagnosis penyakit infeksi *new-emerging* dan *re-emerging*. Tugas lain yang diemban oleh laboratorium Nasional Sri Oemijati yaitu untuk mengkoordinasi dan mengelola spesimen klinik, materi biologik dan/atau muatan informasinya (data molekuler). Selain itu juga disebutkan bahwa Laboratorium Nasional Sri Oemijati berperan sebagai laboratorium penelitian yang berkaitan dengan penyakit infeksi *new-emerging* dan *re-emerging*.

Laboratorium Nasional Sri Oemijati adalah laboratorium riset yang juga melakukan berbagai kegiatan penelitian dan eksperimen di bidang kesehatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penyakit dan memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Selain itu, laboratorium ini juga menghasilkan inovasi-inovasi, mengembangkan standar-standar kesehatan, dan juga melakukan evaluasi atas peran laboratorium jejaringnya, serta hasil penelitian yang dilakukan juga digunakan untuk mengembangkan kebijakan kesehatan nasional. Laboratorium Nasional Sri Oemijati tidak hanya berperan di dalam penelitian kesehatan, namun berkiprah juga sebagai laboratorium pusat rujukan nasional untuk penyakit infeksi *new-emerging* dan *re-emerging*. Laboratorium Nasional Sri Oemijati juga berperan di dalam menghadapi berbagai pemeriksaan penyakit infeksi seperti *avian influenza* (flu burung), flu babi, meningitis, polio, campak, *monkey pox* (cacar monyet), difteri, pertusis, tuberkulosis, dan COVID-19 serta berbagai penyakit lain yang berpotensi

wabah. Fungsi dan peran laboratorium dalam melakukan pemeriksaan penyakit berpotensi wabah ini juga didukung oleh regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Tabel 1. 1 Kegiatan dan yang dilakukan oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

No	Kegiatan	Regulasi
1	Diagnosis penyakit Difteri	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri Tahun 2018
2	Diagnosis Penyakit Pertusis	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging Buku Petunjuk Teknis Surveilans Pertusis Untuk Petugas Surveilans Tahun 2021
3	Diagnosis Penyakit Polio	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/322/2015 Tentang Penunjukan Laboratorium Polio, Campak, dan Rubela
4	Diagnosis Penyakit Campak	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/322/2015 Tentang Penunjukan Laboratorium Polio, Campak, dan Rubela
5	Diagnosis Penyakit ILI-SARI (penyakit pernafasan akut)	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
6	Diagnosis Penyakit COVID	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
7	Diagnosis penyakit baru yang berpotensi wabah (Ebola, Marburgh)	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging

Sumber: Dokumen di Laboratorium Nasional, 2023 (diolah peneliti)

Setelah pengalihan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan inovasi dari Badan Litbangkes ke BRIN, maka Badan Litbangkes sudah tidak berfungsi sebagai laboratorium penelitian dan hanya menyisakan Laboratorium Nasional Sri Oemijati yang kehilangan payung utamanya, sehingga status Laboratorium Nasional ini menjadi tidak jelas. Dalam kondisi ini, Laboratorium Nasional Sri Oemijati masih harus melakukan fungsi dan peranannya di dalam kegiatan surveilans agar pelayanan kesehatan masyarakat terkait dengan pemeriksaan dan diagnosis penyakit infeksi tidak terbengkalai.

Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merupakan cikal bakal pembentukan organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 ini sebagai landasan hukum dalam meleburkan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan inovasi ke dalam BRIN, sehingga Badan Litbangkes harus bubar dan melebur ke dalam BRIN.

Dengan kebijakan tersebut, maka Laboratorium Nasional Sri Oemijati yang berada di bawah Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan tidak mempunyai naungan lagi kehilangan fungsi utama sebagai laboratorium penyelenggara penelitian dan laboratorium pengembangan kesehatan dan sebagai laboratorium jejaring diagnosis penyakit infeksi *New-Emerging* dan *Re-emerging* untuk menghadapi penyakit berpotensi wabah.

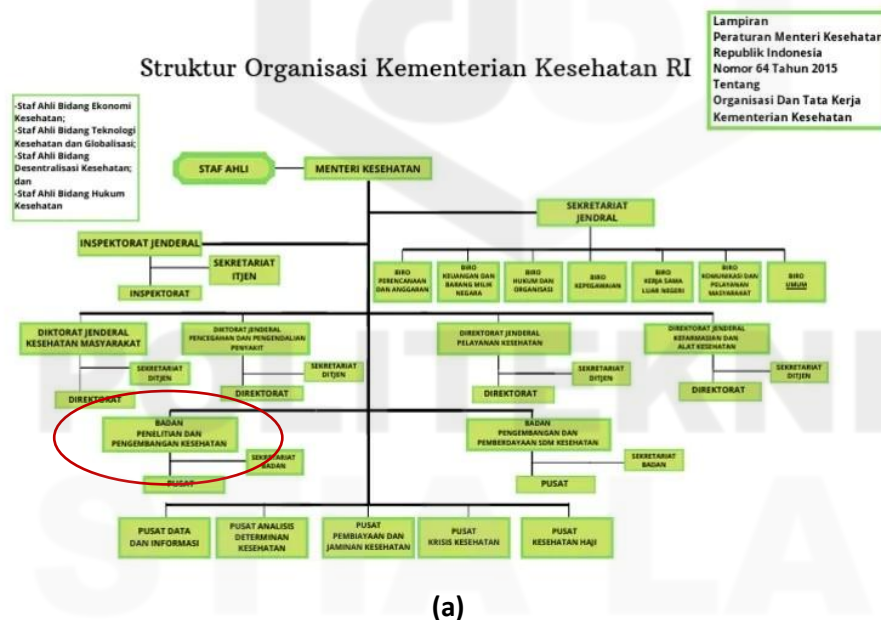
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging* dalam melakukan fungsi jejaring laboratorium pemeriksaan untuk menghadapi penyakit berpotensi wabah. Di dalam Pasal 5 berbunyi,

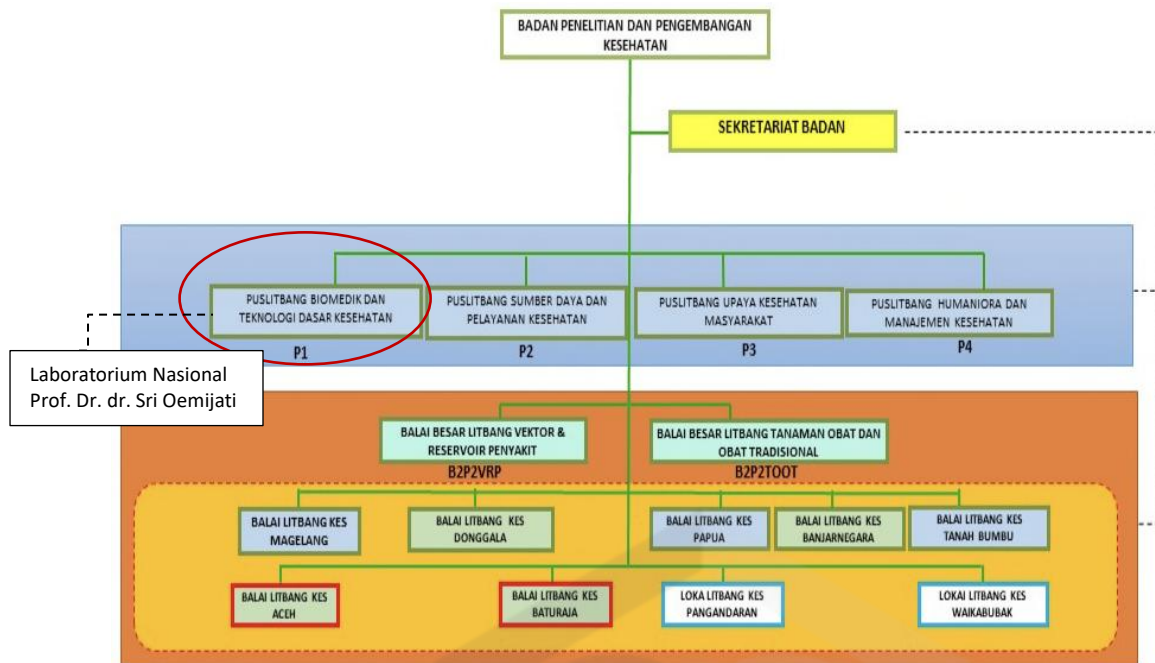
“Jejaring laboratorium diagnosis penyakit infeksi new-emerging dan re-emerging adalah entitas laboratorium di Indonesia yang mengelola spesimen klinik, materi biologic dan/atau muatan informasinya yang dikoordinasikan secara terpusat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.”

Pada Permenkes 658/2009 tersebut melekat fungsi Laboratorium Nasional Sri Oemijati di bawah Badan Litbangkes sebagai laboratorium jejaring diagnosis

penyakit infeksi. Dengan pembubaran Badan Litbangkes maka fungsi laboratorium jejaring ini juga menjadi hilang. Fungsi laboratorium sebagai jejaring diagnosis ini sangat penting karena berkaitan langsung terhadap pelayanan masyarakat dalam membantu diagnosis penyakit infeksi seperti flu burung (influenza H5N1), infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), meningitis, difteri dan pertussis. Data hasil pemeriksaan/diagnosis ini akan dijadikan data yang akan mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pengendalian penyakit infeksi yang berpotensi wabah. Dengan hilangnya legalitas sebagai laboratorium jejaring, maka terjadi masalah terhadap arus dan pola pengiriman sampel/spesimen yang akan dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu perlu segera disusun regulasi baru sebagai payung hukum kegiatan surveilans menggantikan Permenkes 658/2009.

Gambar 1. 2 (a) Posisi Badan Litbangkes berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 dan (b) Laboratorium Nasional Sri Oemijati berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009





(b)

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015 (diolah peneliti)

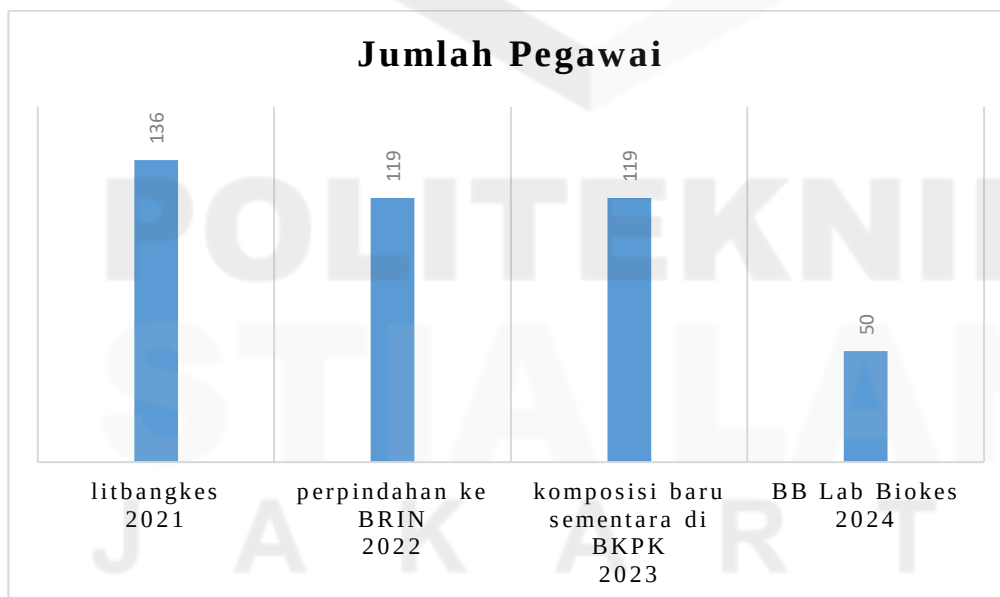
Keterangan: Peneliti ingin memberikan informasi terkait kedudukan Laboratorium Nasional Sri Oemijati yang melekat dengan Puslitbang Biomedik dan Teknologi Dasar Kesehatan.

Laboratorium Nasional Sri Oemijati juga melakukan fungsi pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemeriksaan Kimia dan Bakteriologi Air yang sudah melalui standarisasi dan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), pemeriksaan rutin untuk penelitian dan diagnosis penyakit flu burung, polio dan campak yang juga sudah dilakukan standarisasi oleh World Health Organization (WHO). Dengan adanya perubahan kondisi ini, maka saat ini pelayanan PNBP juga tidak dapat dilakukan lagi. Selain itu, dengan dibubarkannya Badan Litbangkes maka akreditasi pemeriksaan yang sudah diperoleh oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati menjadi tidak berlaku dan perlu dilakukan akreditasi ulang yang tentunya akan menyita begitu banyak waktu, tenaga dan pembiayaan. Dengan adanya kondisi ini, pelayanan yang

sebelumnya dapat dilakukan oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati mengalami gangguan dan terhambat.

Dampak yang terasa dari pembubaran Badan Litbangkes juga terjadi pada staf yang bekerja di Laboratorium Nasional Sri Oemijati. Pada gambar 1.3 terlihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah staf/pegawai di Laboratorium Nasional Sri Oemijati, yang pada awalnya mencapai lebih dari 100 pegawai kemudian menyusut menjadi hanya 50 pegawai. Karena sebagian besar staf berpengalaman dan berpotensi ikut melebur ke dalam BRIN dan staf yang tersisa di Laboratorium Nasional Sri Oemijati adalah staf dan mantan peneliti yang dahulu berada di Badan Litbangkes yang harus melakukan perubahan status fungsional pegawainya menjadi Analis Kebijakan, Administrator Kesehatan untuk yang mempunyai latar belakang tenaga kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan untuk staf litkayasa. Oleh karena itu terjadi ketimpangan jumlah dan peran yang harus dijalankan oleh SDM yang bertahan.

Gambar 1. 3 Jumlah SDM di Laboratorium Nasional Sri Oemijati saat Badan Litbangkes (2021), Peralihan ke BRIN (2022), Diindukkan di BKPK (2022), dan sebagai UPT BB Laboratorium Biologi Kesehatan (2023)



Sumber: BB Laboratorium Biologi Kesehatan, 2023 (diolah peneliti)

Peran penting Laboratorium Nasional Sri Oemijati dalam pemeriksaan spesimen/sampel klinis penyakit yang berpotensi wabah saat ini belum tergantikan maka melalui Surat Penugasan Nomor UM.01.05/III/3748/2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan memberikan tugas sementara kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) untuk mengampu Laboratorium Nasional Sri Oemijati agar masih dapat melakukan peranannya sebagai laboratorium terapan dan melakukan aktifitas pemeriksaan dan diagnosis penyakit-penyakit berpotensi wabah. Di dalam surat tugas ini juga tidak dijelaskan batas waktu pengampuan yang dapat dilakukan oleh BKPK, sehingga status Laboratorium Nasional Sri Oemijati juga belum mempunyai kejelasan.

Setelah peralihan Badan Litbangkes tahun 2021 lalu, ada rencana besar di Kementerian Kesehatan dalam membuat Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam upaya mendukung dan penguatan transformasi layanan primer dan ketahanan kesehatan. Pada tahun 2023 ini, dilakukan penataan dan pengelolaan di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai pengampu laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium kesehatan masyarakat ini merupakan laboratorium yang melakukan pelayanan pemeriksaan yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Seperti Laboratorium *Central of Disease Control* (CDC) di Amerika, yang dikenal sebagai laboratorium kesehatan masyarakat (*publik health laboratory*) ini mempunyai beberapa kebijakan strategis guna menunjang kesehatan masyarakat. Kebijakan strategis yang dilakukan yaitu untuk memperkuat surveilans epidemiologi dan laboratorium; sebagai pusat dari kesehatan global; serta dapat bekerja melalui kebijakan naegara bagian ataupun pemerintah lokal (Centers for Disease Control and Prevention, 2017).

Pada saat ini, Laboratorium Nasional Sri Oemijati masih menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring Diagnosis Penyakit Infeksi New-

Emerging dan *Re-Emerging* dalam melakukan fungsi jejaring laboratorium pemeriksaan untuk menghadapi penyakit berpotensi wabah. Di dalam Pasal 5 berbunyi,

“Jejaring laboratorium diagnosis penyakit infeksi new-emerging dan re-emerging adalah entitas laboratorium di Indonesia yang mengelola spesimen klinik, materi biologic dan/atau muatan informasinya yang dikoordinasikan secara terpusat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan”.

Walaupun secara legal, aturan itu sudah tidak berlaku karena Badan Litbangkes yang menjalani fungsi jejaring laboratorium sudah dibubarkan.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Kesehatan No.26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan merupakan dasar hukum pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) baru dalam tugasnya untuk penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Laboratorium Nasional Sri Oemijati kemudian mengalami perubahan struktur organisasi menjadi institusi mandiri. Laboratorium Nasional Sri Oemijati menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) setingkat Eselon II-b yaitu Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang berinduk di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Saat ini, Laboratorium Nasional Sri Oemijati sudah menjadi UPT baru laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan maka masalah yang akan muncul yaitu berkaitan dengan standard yang ditetapkan oleh aturan tersebut yang belum bisa dipenuhi oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati karena tugas dan fungsi organisasi yang mengalami perubahan.

B. Identifikasi Masalah

Melihat kilas balik dari uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang mengenai Laboratorium Nasional Sri Oemijati paska peralihan Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam analisis kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati menghambat proses pelayanan;
2. Hilangnya fungsi legal dan peranan Laboratorium Nasional Sri Oemijati sebagai laboratorium jejaring penyakit *new-emerging* dan *re-emerging* (PINERE) sesuai dengan Permenkes 658/2009 dan belum ada regulasi pengganti;
3. Perubahan status dan fungsi merubah skema kerja sama Laboratorium Nasional Sri Oemijati sebagai Laboratorium penyakit berpotensi wabah *new-emerging* dan *re-emerging* (PINERE) dengan dunia internasional;
4. Perubahan peran Laboratorium Nasional Sri Oemijati sebagai koordinator jejaring surveilans penyakit berpotensi wabah sesuai dengan Permenkes 658/2009 menyebabkan tidak adanya legalitas dalam berkegiatan;
5. Penyesuaian ulang terhadap jenis jenjang karir fungsional bagi SDM yang tertinggal di Laboratorium Nasional Sri Oemijati menghambat administrasi SDM;
6. Jumlah tenaga SDM Laboratorium Nasional Sri Oemijati yang minimal (sedikit) sehingga menimbulkan gap pengetahuan, kemampuan, dan pelayanan.

C. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dan latar belakang masalah di atas memberikan gambaran terkait rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa kebijakan penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati paska peralihan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan belum berjalan optimal?
2. Bagaimana strategi penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati paska peralihan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
2. Untuk menyusun strategi di dalam penataan kelembagaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat diadopsi oleh Kementerian Kesehatan.
2. Referensi akademik dalam bidang formulasi kebijakan kelembagaan, dalam kebijakan pada umumnya dan khususnya terkait dengan penataan kelembagaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang kebijakan penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proses penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati belum berjalan dengan optimal di internal lembaga yaitu di struktur, sumber daya manusia, teknologi, dan penataan fisik. Perubahan di internal lembaga ini karena adanya dorongan dari faktor eksternal yaitu:
 - a. faktor politis (*politic*) meliputi regulasi dan kepemimpinan;
 - b. faktor lingkungan (*environment*) dengan adanya pandemi COVID-19;
 - c. faktor sosial (*social*) meliputi kebutuhan masyarakat pada sistem kesehatan yang baik dan permasalahan kesehatan yang semakin banyak; serta
 - d. faktor teknis (*technical*) yang meliputi fasilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi.

Faktor politis dan administratif dianggap menjadi faktor yang berperan di dalam penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati. Namun, faktor administratif dianggap menjadi faktor yang paling berperan. Faktor administratif yang berperan yaitu faktor lingkungan, sumber daya manusia, fasilitas dan kolaborasi.

2. Berdasarkan hasil pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati paska peralihan Badan Litbangkes maka strategi-strategi yang dapat dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai dengan merancang program pelatihan yang sesuai dan membuka peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. memenuhi jumlah kekurangan pegawai agar sesuai dengan analisis beban kerja dengan membuka *job vacancy* dan mutasi ke dalam;
- c. menyusun dan atau mengharmonisasi regulasi yang mendukung kegiatan jejaring laboratorium dan surveilans labkesmas agar pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik;
- d. mengatur dan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas gedung saat ini guna menunjang kegiatan administrasi dan pelayanan; dan
- e. memetakan dan merencanakan pembangunan fasilitas pelengkap penting yang belum dimiliki oleh Laboratorium Nasional Sri Oemijati dengan matang.

Strategi yang disusun ini merupakan strategi yang sudah diukur tingkatan urgensinya sehingga dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi realistik lembaga Laboratorium Nasional Sri Oemijati.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan studi kasus kebijakan penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati (Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan) dan analisis yang sudah dilakukan serta melihat urgensi dari permasalahan yang ada sebagai akibat dari kebijakan penataan kelembagaan di Laboratorium Nasional Sri Oemijati maka peneliti merekomendasikan dan menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam memaksimalkan upaya pengelolaan maka dibutuhkan peran Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dan Biro Organisasi Sumber Daya Manusia untuk membantu pengelolaan Laboratorium Nasional Sri Oemijati di tahun awal pembentukannya sebagai UPT yang mandiri sehingga peran penting, administrasi dan fungsi layanan yang dilakukan

Laboratorium Nasional Sri Oemijati dapat dilakukan dengan maksimal dan baik.

2. Di dalam upaya mendukung strategi-strategi dalam penataan kelembagaan terutama di penguatan jejaring laboratorium dan jejaring surveilans dengan melibatkan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat bersama dengan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dalam membangun kolaborasi dan kerja sama dalam rangka sosialisasi tugas fungsi baru Laboratorium Nasional Sri Oemijati ke Laboratorium regional level/tier 4 dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota guna meningkatkan kemitraan yang baru sistem jejaring surveilans dapat merata dan berjalan dengan baik, sehingga proses monitoring dan evaluasi awal program labkesmas dapat dilakukan dengan maksimal.
3. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Laboratorium Nasional Sri Oemijati sebagai lembaga baru, sehingga dapat dianalisis peran dan efektivitas lembaga ini di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Suwandono, Arie Rukmantara, Annissa S. Febrina, Emmy Fitri, & Yudhi Nugroho. (2020). *Buku Dance of Minds II Kiprah Badan Litbangkes* (Anorital, Ed.). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Baker, D. (2007). *Strategic change management in public sector organisations*. Elsevier.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Buchanan, D. A., & Huczynski, A. A. (2017). *Organizational Behaviour* (9th ed.). Pearson.
- Camarinha-Matos, M.L. & Afsharmanesh, H. (2008). *Concept of collaboration: Information science reference*. New York: Hersey.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dunn, W. N., William, N., Witliam, I., & Dunn, N. (2007). *Public Policy Analysis An Introduction, Fourth Edition* (C. Jones-Owen, Ed.; 4th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson Education, Inc.
- Faustino, C. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Frederickson, H. G. (1980). *New Public Administration*. The University of Alabama Press.
- Gani, N. A., Utama, R. E., Jaharuddin, & Priharta, A. (2020). *Perilaku Organisasi*. Penerbit Mirqat. <https://www.researchgate.net/publication/351880570>
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1964). *Sociology*. McGraw Hill Book Company.
- Johnson, G., Scholes, K., & Sexty, R.M. (1989). *Exploring Strategic Management*. Scarborough, Ontario: Prentice Hall.
- Jordan, A. J., & Turnpenny, J. R. (2015a). The tools of policy formulation: Actors, capacities, venues and effects. In *The Tools of Policy Formulation: Actors, Capacities, Venues and Effects*. Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781783477043>

- Kasmir, K. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Langton, N., Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). *Organizational Behavior Concepts, Controversies, Applications* (7th ed.). Pearson.
- McGill, R. (1996). *Institutional Development: A Third World City Management Perspective*. St. Martin's Press.
- Meyer, M. W. (2008). *Change in Public Bureaucracies*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (William L. (2014). *Social research methods : qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta.
- Patton, M. Quinn. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications.
- Paul du Gay. (2000). *In Praise of Bureaucracy*. SAGE Publications.
- Paul du Gay. (2005). *The Values of Bureaucracy*. Oxford University Press.
- Rangkuti, F. (2008). *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson.
- Ruhana, F. (2018). *Teori Organisasi dan Implementasinya dalam Penataan Organisasi pada Perangkat Daerah*. IPDN.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- World Health Organization. (2016). *International Health Regulation (2005)* (3rd ed.). WHO.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Yuningsih, T. (2019). *Kajian Birokrasi* (1st ed.). Departemen Administrasi Publik Press.

ARTIKEL JURNAL

- Aksom, H., & Vakulenko, V. (2023). Revisiting the scope and suggesting novel domains of institutional theory in the public administration research. *Teaching Public Administration*. <https://doi.org/10.1177/01447394231191935>
- Anshen, M., & Guth, W. D. (1973). Strategies for Research in Policy Formulation. In *Source: The Journal of Business* (Vol. 46, Issue 4).
- Ashmi Atthahira, N., Eliyana, A., Joesah, N., Tarigan, B., & Ali Ahmad, M. (2021). Change Management and Creativity during Pandemic Covid-19 in Indonesia. In *Systematic Reviews in Pharmacy* (Vol. 12, Issue 1).
- Center for Disease Control and Prevention. (2002). *Core Functions and Capabilities of State Public Health Laboratories. National Task Force on Fetal Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Effect Defining the National Agenda for Fetal Alcohol Syndrome and Other Prenatal Alcohol-Related Effects*.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2017). *Advancing Public Health: The Story of the National Public Health Improvement Initiative*.
- David, R. J., Tolbert, P. S., & Boghossian, J. (2019). Institutional Theory in Organization Studies. In *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.158>
- Declich, S., & Carter, A. O. (1994). Reviews Analysis Public health surveillance: historical origins, methods and evaluation. *Bulletin of the World Health Organization*, 72(2), 285–304.
- Drori, G. S. (2020). Hasn't Institutional Theory Always Been Critical?! *Organization Theory*, 1(1), 263178771988798. <https://doi.org/10.1177/2631787719887982>
- Etheridge, F., Couturier, Y., Trouvé, H., Saint-Jean, O., & Somme, D. (2009). Is the PRISMA-France glass half-full or half-empty? The emergence and management of polarized views regarding an integrative change process. *International Journal of Integrated Care*, 9(4). <https://doi.org/10.5334/ijic.510>
- Felin, T., & Foss, N. (2019). Microfoundations for institutional theory? In *Research in the Sociology of Organizations* (Vol. 65B, pp. 393–408). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/S0733-558X2019000065B031>
- Frieden, T. R., Harold Jaffe, D. W., Thacker, S. B., Moolenaar, R. L., Lee, L. M., Meyer, P. A., Leahy, M. A., Martinroe, J. C., Spriggs, S. R., Starr, T. M., Doan, Q. M., King, P. H., Roper, W. L., Hill, C., Matthew Boulton, C. L., Arbor, A.,

- Virginia Caine, M. A., Jonathan Fielding, I. E., Holtzman, D., ... John Ward, G. W. (2012). Morbidity and Mortality Weekly Report Supplement Centers for Disease Control and Prevention MMWR Editorial and Production Staff MMWR Editorial Board. *MMWR*, 61.
- Hwang, H., Colyvas, J. A., Hoffman, S., Jang, Y. S., Jun, S., Krücken, G., Lounsbury, M., Meyer, J., Powell, W., Suarez, D., & Suddaby, R. (2014). Ontology, Levels of Society, and Degrees of Generality: Theorizing Actors as Abstractions in Institutional Theory. *Academy of Management Review*, 1–68.
- Jamali, D., & Neville, B. (2011). Convergence Versus Divergence of CSR in Developing Countries: An Embedded Multi-Layered Institutional Lens. *Journal of Business Ethics*, 102(4), 599–621. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0830-0>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <http://www.jstor.org/stable/2778293>
- Mokdad, A. H. (2009). The behavioral risk factors surveillance system: Past, present, and future. *Annual Review of Public Health*, 30, 43–54. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.031308.100226>
- Mustalish, A. C., Eidsvold, G., & Novick, L. F. (1976). Decentralization in the New York City Department of Health: Reorganization of a Public Health Agency. *Am. J. Public Health*, 66(12), 1149–1154.
- Myhre, S. L., French, S. D., & Bergh, A. (2022). National public health institutes: A scoping review. *Global Public Health*, 17(6), 1055–1072. <https://doi.org/10.1080/17441692.2021.1910966>
- Pagliaro, M., & Coccia, M. (2020). How Reorganizations of Public Research Laboratories affect the Evolution of Scientific Activity and Production: A case study in Italy from 2000 to 2020. *SSRN*, 1–9. <https://ssrn.com/abstract=3712426>
- Peters, B. G. (1992). Government Reorganization: A Theoretical Analysis. *International Political Science Review*, 13(2), 199–217. <http://www.jstor.org/stable/1601532>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rosenfeld, E. L., Binder, S., Brush, C. A., Whitney, E. A. S., Jarvis, D., Seib, K., Verani, A. R., Flores, M. A., & Menon, A. N. (2020). National Public Health Institute Legal Framework: A Tool to Build Public Health Capacity. *Health Security*, 18(S1), S43–S52. <https://doi.org/10.1089/hs.2019.0093>

- Soundari, P. (2016). PEST Analysis of the Health Care Sector in Coimbatore District. *Prasanna Soundari B.; Sch J Econ Bus Manag*, 3(5). <https://doi.org/10.36347/sjebm.2016.v03i05.005>
- Thakur, V. (2021). Framework for PESTEL dimensions of sustainable healthcare waste management: Learnings from COVID-19 outbreak. *Journal of Cleaner Production*, 287. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125562>
- Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the Decision: Implementing Policy Reforms in Developing Countries. In *World Development* (Vol. 18, Issue 8).
- Vargas, M. I. R. (2015). Determinant Factors for Small Business to Achieve Innovation, High Performance and Competitiveness: Organizational Learning and Leadership Style. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169, 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.284>
- Visconti, R. M. (2016). Healthcare public-private partnership in Italy: Assessing risk sharing and governance issues with PESTLE and SWOT analysis. *Corporate Ownership and Control*, 13(4), 112–131. <https://ssrn.com/abstract=2422450>
- Vivek, R. (2022). A Systematic Review of the Consequences of Covid-19 Pandemic and Expansion of Pestle Framework: Time to Perceive Health Environment as a Separate Dimension. *International Economic Policy*, 37, 55–76. <https://doi.org/10.33111/iep.eng.2022.37.03>
- Wahyudi, A., Haryani Hatta, I., Trirahayu, D., & Pancasila, U. (2023). Strategy For Strengthening Sustainable Bumdesa In Pamijahan Bogor: A Pestle Analysis Approach. Ade Wahyudi, et.al Strategy for strengthening sustainable BumDESA in Pamijahan Bogor: A PESTLE Analysis approach under a creative commons attribution non-commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Walker, L. (1989). Woodrow Wilson, Progressive Reform and Public Administration. *Political Science Quarterly*, 104(3), 509–525. <https://about.jstor.org/terms>
- Wulandari, R. D., Supriyanto, S., Qomaruddin, M. B., Damayanti, N. A., & Laksono, A. D. (2020). Role of leaders in building organizational readiness to change - Case study at public health centers in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 18(3), 1–10. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(3\).2020.01](https://doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.01)

Xian, M., Zhao, C., & Zhou, Y. (2022). From Bureaucratic Coordination to a Data-Driven Model: Transformation and Capacity Building of Community-Based Prevention and Control of Public Health Events. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14). <https://doi.org/10.3390/ijerph19148238>

Zuber, A., Pearson, J., Sebeh, Y., Jarvis, D., & Bratton, S. (2023). Essential public health functions are not enough: fostering linkages between functions through National Public Health Institutes improves public health impact. *BMJ Global Health*, 8(6), e011728. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-011728>

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (2008). www.peraturan.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan (2021). www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan (2022).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/menkes/Per/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging, Kementerian Kesehatan RI 1 (2009).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pub. L. No. No. 1508, 2015, Kementerian Kesehatan 1 (2015). www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, Kementerian Kesehatan (2014).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan (2023).

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1254/2022 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan (2022).

Surat Tugas Nomor UM.01.05/III/3748/2022 Tentang Pengelolaan Laboratorium Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (2022).

Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Politeknik STIA
LAN Jakarta (2021).



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A